

KEPEMIMPINAN ELI SEBAGAI PRAKTIK KEKUASAAN RELASIONAL: SEBUAH KRITIK FOUCAULTIAN TERHADAP NEPOTISME

Willy Etantri Wira Adi, Patrick Martinus, Erna Setianingrum

Abstract

Relational leadership, which emphasizes proximity and trust, frequently serves as a gateway for nepotistic practices, particularly within community-based organizations such as churches. This article aims to analyze the leadership of Eli the Priest (1 Samuel 2–4) through the lens of Michel Foucault's relational power theory to uncover the mechanisms of social nepotism concealed within religious authority structures. This study employs a qualitative hermeneutic approach alongside critical discourse analysis, utilizing the biblical text as primary data and literature on nepotism and power theory as secondary data. The findings indicate that Eli's leadership failure was not merely an individual moral failing, but rather the product of a relational power network that positioned his sons as an inner circle, thereby normalizing deviance and hindering accountability. The Foucaultian analysis reveals how pastoral power can be distorted into an instrument of domination through relational closeness. This article contributes to the discourse on Christian leadership by introducing a critical-sociological perspective to diagnose the pathology of relational nepotism, while also offering a prevention framework based on accountability and transparency systems. The results of this research are highly relevant for both religious and secular organizations in managing the risks associated with the abuse of power through inner circles.

Keywords: *Eli's Leadership, Relational Power, Social Nepotism, Foucault, Accountability.*

Abstrak

Kepemimpinan relasional yang menekankan kedekatan dan kepercayaan seringkali menjadi jalan masuk bagi praktik nepotisme, khususnya dalam organisasi berbasis komunitas seperti gereja. Artikel ini bertujuan menganalisis kepemimpinan Imam Eli (1 Samuel 2–4) melalui lensa teori kekuasaan relasional Michel Foucault untuk mengungkap mekanisme nepotisme sosial yang terselubung dalam struktur otoritas keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hermeneutika dan analisis wacana kritis dengan data primer teks Alkitab dan data sekunder literatur tentang nepotisme dan teori kekuasaan. Temuan menunjukkan bahwa kegagalan kepemimpinan Eli bukan semata kegagalan moral individu, melainkan produk dari jaringan kekuasaan relasional yang memposisikan anak-anaknya sebagai *inner circle* yang menormalisasi penyimpangan dan menghambat akuntabilitas. Analisis Foucaultian mengungkap bagaimana Pastoral Power dapat terdistorsi menjadi alat dominasi melalui kedekatan relasional. Artikel ini

berkontribusi pada diskusi kepemimpinan Kristen dengan memperkenalkan perspektif kritis-sosiologis untuk mendiagnosis patologi nepotisme relasional, serta menawarkan kerangka pencegahan berbasis sistem akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian relevan bagi organisasi religius dan sekuler dalam mengelola risiko penyalahgunaan kuasa melalui lingkaran dalam.

Kata Kunci: Kepemimpinan Eli, Kekuasaan Relasional, Nepotisme Sosial, Foucault, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika organisasi modern, kepemimpinan tidak pernah dapat dilepaskan dari pola-pola relasional yang membentuknya. Setiap organisasi, baik yang bersifat sekuler maupun religius, selalu mengandalkan jaringan hubungan antarmanusia sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda kepemimpinan dan pencapaian tujuan bersama. Model relasional ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan, mengingat bahwa kepercayaan dan kedekatan pribadi seringkali menjadi modal sosial yang memperlancar koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi di antara para anggota organisasi. Dalam konteks ini, pencapaian-pencapaian yang diraih oleh individu-individu dalam struktur organisasi—baik berupa penghargaan finansial, promosi jabatan, maupun bentuk-bentuk pengakuan lainnya—seringkali tidak dapat dilepaskan dari kualitas hubungan personal yang mereka bangun dengan para pemimpin atau pengambil keputusan di dalam organisasi tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa dimensi relasional dalam kepemimpinan memiliki peran yang signifikan dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam analisis tentang bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana individu-individu di dalamnya mencapai keberhasilan (Sekretariat Jmbk, 2023, hlm. 106).

Namun demikian, di balik keniscayaan model kepemimpinan relasional tersebut, tersimpan pula potensi distorsi yang serius ketika kedekatan pribadi mulai menggantikan pertimbangan-pertimbangan objektif berbasis kompetensi dan meritokrasi. Distorsi ini dalam literatur sosiologi organisasi dikenal dengan istilah nepotisme, yang secara klasik dipahami sebagai praktik mengutamakan kerabat atau keluarga dalam distribusi jabatan dan sumber daya organisasi. Akan tetapi, perkembangan masyarakat modern telah melahirkan bentuk nepotisme yang lebih halus dan kompleks, yang oleh para ahli disebut sebagai nepotisme

sosial. Berbeda dengan nepotisme klasik yang berbasis ikatan darah, nepotisme sosial beroperasi melalui jaringan kedekatan relasional non-keluarga seperti pertemanan akrab, kesamaan latar belakang pendidikan, kesetiaan personal yang telah teruji, atau bahkan ikatan-ikatan primordial lainnya yang terbangun dalam perjalanan panjang interaksi sosial. Dalam praktiknya, nepotisme sosial ini seringkali lebih sulit dideteksi dan dikritik karena ia dibungkus dalam narasi-narasi tentang loyalitas, kepercayaan, dan keharmonisan hubungan, padahal pada saat yang bersamaan ia secara sistematis mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan kesempatan, dan penghargaan terhadap kompetensi yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap organisasi yang sehat (Puansah, 2025, hlm. 12). Ketika seseorang mendapatkan keuntungan atau akses istimewa semata-mata karena kedekatan relasionalnya dengan pemimpin, sementara individu lain yang lebih kompeten terpinggirkan, maka pada saat itulah organisasi sedang mengalami proses degradasi kualitas dan legitimasi yang berbahaya.

Persoalan nepotisme sosial ini menjadi semakin krusial ketika ia memasuki ranah kepemimpinan religius, khususnya dalam konteks kepemimpinan Kristen di gereja-gereja. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik yang melekat pada kepemimpinan rohani, di mana seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab secara organisatoris kepada jemaat atau lembaga gerejawi, tetapi juga secara teologis kepada Allah sebagai sumber otoritas tertinggi. Dalam iman Kristen, pemimpin rohani dipanggil untuk menjadi gembala yang memelihara, membimbing, dan melayani umat dengan penuh integritas, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau membangun kerajaan kekuasaannya sendiri. Orientasi utama seorang pemimpin Kristen seharusnya tertuju pada proses pembentukan spiritual umat, pada penggembalaan jiwa-jiwa, dan pada kesaksian tentang kebenaran Allah di tengah dunia. Ketika praktik nepotisme sosial kemudian merasuki struktur kepemimpinan gereja, maka terjadi apa yang dapat disebut sebagai pembajakan terhadap panggilan luhur tersebut. Kepemimpinan yang seharusnya berorientasi pada pelayanan berubah menjadi kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan aktualisasi diri dan penguatan posisi personal. Jaringan relasi yang seharusnya menjadi sarana untuk membangun komunitas iman yang sehat justru berubah menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Dalam situasi seperti ini, integritas kepemimpinan Kristen menghadapi tantangan yang sangat serius, karena batas antara pelayanan dan kepentingan pribadi menjadi kabur, antara panggilan ilahi dan ambisi personal

menjadi sulit dibedakan (Yonatan Alex Arifianto, Mulyono dan Nainggolan, 2024, hlm. 8).

Untuk memahami secara lebih konkret bagaimana dinamika nepotisme sosial bekerja dalam struktur kepemimpinan religius, kita dapat menelusuri narasi kepemimpinan Imam Eli di Silo sebagaimana tercatat dalam 1 Samuel 2:12–4:22. Kisah ini menyajikan contoh yang sangat paradigmatik tentang bagaimana sebuah kepemimpinan rohani dapat mengalami kemerosotan etis yang dahsyat akibat ketidakmampuan pemimpin mengelola lingkaran dalam kekuasaannya. Eli, yang menjabat sebagai Imam Besar di pusat ibadah Israel, memiliki dua orang anak, Hofni dan Pinehas, yang juga berstatus sebagai imam dan dengan demikian memiliki otoritas keagamaan yang signifikan. Narasi alkitabiah menggambarkan bahwa kedua anak Eli ini adalah “orang-orang dursila” yang “tidak mengenal TUHAN” (1 Sam 2:12), yang menyalahgunakan korban persembahan umat (1 Sam 2:13-17) dan bahkan melakukan percabulan di depan pintu Kemah Pertemuan (1 Sam 2:22). Yang sangat mencengangkan dari kisah ini adalah bahwa penyimpangan berat tersebut dapat berlangsung terus-menerus tanpa intervensi yang berarti dari Eli selain teguran lisan yang ringan dan tidak efektif. Dalam pembacaan teologis konvensional, kisah Eli ini biasanya dipahami sebagai peringatan tentang tanggung jawab orangtua dalam mendidik anak, atau tentang konsekuensi dari pelanggaran terhadap perjanjian dengan Allah. Para penafsir seringkali menyoroti kegagalan moral Eli sebagai seorang ayah dan sebagai seorang imam, serta menekankan penghukuman ilahi yang kemudian jatuh atas keluarganya sebagai akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan (Barton dan Muddiman, 2001, hlm. 201–202). Pembacaan semacam ini, meskipun memiliki validitas teologisnya sendiri, cenderung membatasi analisis pada dimensi moral individual dan kurang memperhatikan struktur relasional yang memungkinkan penyimpangan tersebut dapat terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Ketika kita menggeser perspektif dari pembacaan moral-normatif menuju analisis sosiologis-kritis, dimensi-dimensi baru yang selama ini tersembunyi mulai tampak ke permukaan. Kita mulai bertanya: bagaimana mungkin dua orang imam yang melakukan penyimpangan berat dapat bertahan dalam jabatan mereka? Mengapa tidak ada mekanisme koreksi dari dalam institusi keimaman itu sendiri? Apa yang membuat umat Israel, yang menjadi korban dari penyalahgunaan wewenang para imam tersebut, tidak mampu melakukan protes atau tuntutan akuntabilitas? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan perhatian kita pada

struktur kekuasaan yang melingkupi kepemimpinan Eli. Dalam posisinya sebagai Imam Besar, Eli berada pada puncak hierarki keagamaan Israel. Anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, adalah bagian dari apa yang dapat disebut sebagai “lingkaran dalam” (inner circle) kekuasaan keimaman. Mereka bukan hanya bawahan Eli secara struktural, tetapi juga keturunannya secara biologis. Kedekatan relasional ganda ini—struktural dan biologis—menciptakan kondisi di mana seharusnya tanggung jawab dan integritas justru semakin dituntut. Namun yang terjadi justru sebaliknya: penyimpangan dapat terjadi dan berlangsung justru karena adanya perlindungan yang diberikan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan. Hofni dan Pinehas dapat berbuat sesuka hati karena mereka tahu bahwa ayah mereka adalah orang yang paling berkuasa di Silo, dan bahwa tidak ada seorang pun yang berani menentang mereka karena kedudukan istimewa mereka sebagai anak Imam Besar. Dengan kata lain, struktur nepotisme sosial yang terbangun di sekitar kepemimpinan Eli menciptakan ruang impunitas di mana penyimpangan dapat tumbuh subur tanpa mekanisme koreksi yang memadai.

Di sinilah letak celah penelitian yang diidentifikasi oleh artikel ini. Sepanjang penelusuran literatur, ditemukan bahwa kajian-kajian terdahulu tentang kepemimpinan Eli masih didominasi oleh pendekatan eksposisi moral atau telaah naratif-teologis yang berfokus pada aspek-aspek normatif. Para penafsir umumnya berkuat pada pertanyaan tentang dosa apa yang dilakukan Eli, mengapa Allah menghukumnya, dan pelajaran moral apa yang dapat dipetik oleh pembaca kontemporer. Sementara itu, kajian-kajian yang menggunakan teori sosial-kritis, khususnya perspektif tentang kekuasaan, untuk menganalisis struktur kepemimpinan Eli masih sangat terbatas. Padahal, narasi tentang Eli, Hofni, dan Pinehas menawarkan bahan yang sangat kaya untuk analisis semacam itu. Bagaimana mekanisme kuasa bekerja dalam relasi antara pemimpin dan lingkaran dalamnya? Bagaimana struktur kekuasaan yang ada memproduksi dan mempertahankan ketidakadilan? Bagaimana praktik-praktik yang seharusnya menyimpang dapat menjadi ternormalisasi dalam suatu sistem relasi yang tertutup? Pertanyaan-pertanyaan ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kajian-kajian sebelumnya (Simatupang dan Tampake, 2025). Padahal, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang teks kuno, tetapi juga memperoleh perspektif kritis yang dapat diterapkan untuk menganalisis fenomena serupa dalam kepemimpinan kontemporer.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, artikel ini menggunakan kerangka teori kekuasaan Michel Foucault sebagai lensa analitis utama. Pemilihan teori Foucault didasarkan pada tiga pertimbangan kunci yang tidak dapat dipenuhi oleh teori-teori kekuasaan lain seperti teori kekuasaan Max Weber (yang memandang kekuasaan sebagai dominasi hierarkis berbasis otoritas legal-rasional) atau teori elite Pareto-Mosca (yang melihat kekuasaan sebagai monopoli kelompok kecil). Pertama, Foucault memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang tersebar dalam jaringan relasi sosial dan bekerja secara produktif, bukan sekadar represif—sehingga cocok untuk menganalisis bagaimana *inner circle* Eli terbentuk melalui kedekatan relasional. Kedua, konsep kuasa pastoral (*pastoral power*) yang dikembangkan Foucault secara spesifik berasal dari analisisnya terhadap tradisi kepemimpinan Kristen, sehingga memiliki relevansi langsung dengan konteks kepemimpinan Imam Eli dalam Perjanjian Lama. Ketiga, pendekatan Foucault memungkinkan analisis tentang normalisasi penyimpangan (*normalization of deviance*) dalam struktur kekuasaan yang tertutup, tanpa terjebak pada penjelasan moral-individual semata. Dengan demikian, Foucault menawarkan perangkat analitis yang paling tajam untuk membedah patologi nepotisme relasional dalam kepemimpinan religius. Foucault, seorang filsuf Prancis yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam kajian sosial dan humaniora, menawarkan cara pandang yang revolusioner tentang kekuasaan. Berbeda dengan teori-teori klasik yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu dan bersifat represif, Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tersebar dalam jaringan relasi sosial dan bekerja secara produktif. Kekuasaan, bagi Foucault, bukanlah barang yang dapat dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain, melainkan strategi yang beroperasi dalam setiap interaksi manusia, membentuk cara berpikir, cara bertindak, dan bahkan cara individu memahami diri mereka sendiri (Barasa dan Riyanto, 2023). Dua konsep kunci dalam pemikiran Foucault yang sangat relevan untuk analisis kepemimpinan Eli adalah konsep kekuasaan sebagai relasi (*power as relation*) dan konsep kuasa pastoral (*pastoral power*). Kekuasaan sebagai relasi menekankan bahwa otoritas seorang pemimpin tidak pernah bersifat mutlak dan sepihak, melainkan selalu dinegosiasikan dan dipertahankan melalui interaksi terus-menerus dengan mereka yang dipimpin. Sementara itu, kuasa pastoral merujuk pada bentuk kekuasaan khas dalam tradisi Kristen, di mana pemimpin berperan sebagai gembala yang bertugas memimpin, memelihara, dan menyelamatkan “kawanan domba”-nya. Kuasa ini bersifat

individual karena memperhatikan setiap jiwa secara personal, bersifat total karena mengatur seluruh aspek kehidupan, dan berorientasi pada keselamatan. Namun, Foucault juga memperingatkan bahwa kuasa pastoral memiliki potensi untuk menjadi sangat koersif ketika sang gembala mulai menggunakan otoritasnya untuk mengontrol dan mendisiplinkan, bukan untuk melayani dan membebaskan (Waring dan Latif, 2018).

Dengan menggunakan kerangka Foucaultian ini, artikel ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi kritis terhadap kepemimpinan Eli. Fokus analisis akan diarahkan pada upaya mengungkap bagaimana praktik nepotisme sosial terbangun dan ternormalisasi dalam struktur kepemimpinan Eli, bagaimana relasi kuasa antara Eli dan anak-anaknya menciptakan kondisi yang memungkinkan penyimpangan berlangsung tanpa koreksi, dan bagaimana konsep kuasa pastoral yang melekat pada jabatan imam justru terdistorsi menjadi alat untuk mempertahankan status quo yang korup. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: pertama, bagaimana konsep kekuasaan relasional Foucault dapat menjelaskan pembentukan dan dampak dari inner circle kekuasaan dalam kepemimpinan Eli? Kedua, bagaimana analisis ini dapat memberikan perspektif baru untuk memahami dan mencegah nepotisme sosial dalam kepemimpinan kontemporer, khususnya dalam konteks kepemimpinan Kristen? Dengan menjawab kedua pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa sintesis antara analisis tekstual biblikal dengan teori sosial-kritis, serta kontribusi praktis berupa peringatan dan rekomendasi bagi organisasi-organisasi keagamaan untuk membangun struktur kepemimpinan yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah studi kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna-makna tersembunyi di balik narasi kepemimpinan Imam Eli dalam 1 Samuel 2:12–4:22. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian penelitian ini bukanlah data-data kuantitatif yang dapat diukur secara numerik, melainkan teks kuno yang sarat dengan dimensi teologis, historis, dan sosiologis yang memerlukan penafsiran mendalam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif mengonstruksi makna dari data yang tersedia, bukan sekadar mengumpulkan

fakta-fakta objektif yang sudah jadi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini yang ingin membongkar lapisan-lapisan makna yang mungkin selama ini terabaikan dalam pembacaan konvensional terhadap kisah Eli. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan analitis utama yang saling melengkapi, yaitu hermeneutika kritis dan analisis wacana ala Foucault. Hermeneutika kritis dioperasionalkan melalui metode interpretasi mendalam terhadap teks 1 Samuel 2:12–4:22 dengan fokus pada penggalian makna di balik fakta empiris naratif, mengikuti kerangka Paul Ricoeur yang menekankan distansiasi dan appropriasi teks sebagai jalan menuju pemahaman diri dan realitas sosial (Pradoko, 2019). Sementara itu, analisis wacana Foucault dioperasionalkan melalui tiga unit analisis: (1) analisis pernyataan (*statement*) untuk mengidentifikasi aturan-aturan pembentukan wacana kepemimpinan Eli; (2) analisis arkeologis (*archaeological analysis*) untuk menelusuri formasi diskursif yang memungkinkan munculnya praktik nepotisme sosial; dan (3) analisis genealogis (*genealogical analysis*) untuk mengungkap relasi kuasa yang memproduksi dan menormalisasi penyimpangan dalam struktur kepemimpinan (Dhona, 2020; Jaya, 2016; Hidayat & Tjahjono, 2021). Ketiga unit analisis ini difokuskan pada pengungkapan mekanisme eksklusi eksternal (pelarangan, pemisahan, penolakan) dan internal (sistem subjeksi) yang membentuk jaringan kekuasaan relasional di sekitar Eli dan anak-anaknya. Kedua pendekatan ini dipilih karena memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap dimensi kekuasaan yang menjadi fokus utama penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nepotisme dalam Perspektif Sosiologi Organisasi

Fenomena nepotisme telah lama menjadi perhatian para ahli sosiologi dan ilmu organisasi karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan dan keberlanjutan institusi-institusi sosial. Dalam pengertian klasiknya, nepotisme dipahami sebagai praktik yang mengutamakan kerabat atau anggota keluarga dalam distribusi jabatan, posisi strategis, atau sumber daya organisasi lainnya, tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki kompetensi yang memadai atau tidak. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Latin “nepos” yang berarti keponakan atau cucu, merujuk pada praktik para paus di abad pertengahan yang sering mengangkat keponakan mereka ke posisi-posisi kardinal demi memperkuat

kekuasaan dan pengaruh keluarga. Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, nepotisme tidak lagi terbatas pada ikatan darah semata, melainkan telah berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lebih halus dan beragam yang oleh para ahli kemudian disebut sebagai “nepotisme sosial” (social nepotism). Nepotisme sosial ini berbasis pada kedekatan relasional non-keluarga, seperti pertemanan akrab yang telah terjalin lama, kesamaan latar belakang pendidikan atau almamater, kesetiaan personal yang telah teruji dalam berbagai situasi, atau bahkan ikatan-ikatan primordial lainnya seperti kesamaan suku, daerah asal, atau afiliasi organisasi (ŞEKER, KARADAYI dan KAYA, 2024, hlm. 210–211).

Yang menarik dari nepotisme sosial adalah bahwa ia seringkali lebih sulit dideteksi dan dikritik dibandingkan dengan nepotisme klasik. Hal ini disebabkan karena nepotisme sosial dibungkus dalam narasi-narasi yang tampak positif, seperti loyalitas, kepercayaan, keharmonisan tim, atau kelancaran komunikasi. Seorang pemimpin yang mengangkat teman dekatnya ke posisi strategis, misalnya, dapat membenarkan tindakannya dengan argumentasi bahwa ia membutuhkan orang-orang yang ia kenal dengan baik dan dapat ia percayai sepenuhnya. Argumentasi semacam ini tentu memiliki kebenarannya sendiri, karena dalam banyak situasi, kepercayaan dan keakraban memang merupakan modal penting dalam bekerja sama. Namun persoalannya muncul ketika pertimbangan-pertimbangan relasional ini mulai mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan objektif berbasis kompetensi dan meritokrasi. Ketika seorang kandidat yang kurang kompeten dipilih hanya karena kedekatannya dengan pemimpin, sementara kandidat lain yang lebih kompeten namun kurang dekat secara personal disingkirkan, maka pada saat itulah organisasi sedang mengalami proses degradasi kualitas yang berbahaya (Puansah, 2025, hlm. 6).

Sebuah penelitian empiris di Indonesia menunjukkan betapa destruktifnya dampak nepotisme sosial terhadap tata kelola organisasi, terutama di tingkat pemerintahan desa. Puansah (2025) dalam studinya tentang praktik nepotisme pada pemerintahan desa menemukan bahwa jaringan relasi sosial yang telah mapan—seperti hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kesamaan afiliasi politik—seringkali menjadi infrastruktur utama bagi praktik-praktik koruptif dan penyalahgunaan wewenang. Ketika kepala desa mengisi posisi-posisi strategis di perangkat desa dengan orang-orang yang dekat secara personal, maka terciptalah apa yang disebut sebagai “lingkaran dalam” (inner circle) yang cenderung tertutup

dari pengawasan dan kritik. Lingkaran dalam ini kemudian dapat dengan mudah terlibat dalam praktik-praktik kolusi, di mana keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan kesepakatan internal tanpa melibatkan partisipasi publik yang semestinya. Dampak jangka panjangnya adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan mandeknya inovasi-inovasi yang seharusnya dapat muncul jika ada kompetisi yang sehat dan terbuka (Puansah, 2025, hlm. 570).

Temuan-temuan empiris ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana mekanisme nepotisme sosial dapat bekerja pula dalam organisasi-organisasi religius seperti gereja. Dalam konteks gereja, batas antara “keluarga biologis” dan “keluarga rohani” seringkali menjadi kabur. Konsep “keluarga Allah” yang digunakan dalam teologi Paulus, misalnya, menciptakan ikatan relasional yang kuat di antara sesama orang percaya, seolah-olah mereka adalah saudara sekandung. Pada satu sisi, ikatan ini adalah sesuatu yang positif karena menciptakan solidaritas dan kepedulian bersama. Namun pada sisi lain, ikatan ini juga dapat menjadi celah masuk bagi praktik nepotisme sosial yang dibungkus dalam bahasa teologis. Seorang pendeta senior yang mengangkat mantan mahasiswa bimbingannya atau teman sepelayanannya ke posisi-posisi strategis di gereja dapat membenarkan tindakannya dengan argumentasi bahwa mereka adalah “orang-orang yang dipanggil Tuhan” atau “orang-orang yang memiliki kesamaan visi”. Padahal di balik pembenaran teologis tersebut, bisa jadi tidak ada proses seleksi yang transparan dan objektif, tidak ada pertimbangan yang memadai tentang kompetensi dan kapasitas, dan tidak ada mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan jemaat untuk mempertanyakan keputusan-keputusan tersebut. Dalam situasi seperti ini, gereja tidak hanya menghadapi risiko inefisiensi organisasi, tetapi juga risiko yang lebih serius yaitu hilangnya kesaksian etisnya di tengah masyarakat.

Nepotisme dan Legitimasi Kekuasaan

Untuk memahami secara lebih mendalam mengapa nepotisme sosial begitu sulit diberantas, kita perlu melihatnya tidak hanya sebagai persoalan distribusi sumber daya yang tidak adil, tetapi juga sebagai strategi pemeliharaan dan legitimasi kekuasaan. Dalam perspektif sosiologi politik, kekuasaan tidak pernah bersifat statis, melainkan selalu membutuhkan reproduksi dan legitimasi agar

dapat bertahan. Seorang pemimpin, betapapun kuatnya ia secara formal, tetap membutuhkan pengakuan dari mereka yang dipimpinnya agar kekuasaannya dapat berjalan efektif. Tanpa legitimasi, kekuasaan akan selalu menghadapi resistensi dan ancaman dari dalam maupun luar. Di sinilah nepotisme sosial memainkan peran penting. Dengan mengisi posisi-posisi kunci dengan orang-orang yang memiliki kedekatan personal dan loyalitas yang tinggi, seorang pemimpin pada dasarnya sedang membangun benteng pertahanan bagi kekuasaannya. Orang-orang ini akan menjadi pendukung setia yang akan membelanya dalam situasi kritis, yang akan menutupi kelemahan-kelemahannya, dan yang akan menyebarkan narasi-narasi positif tentang kepemimpinannya di kalangan yang lebih luas (Saebani dan Mubarak, 2024).

Yang menarik, praktik ini seringkali tidak disadari sebagai sesuatu yang problematik oleh para pelakunya sendiri. Seorang pemimpin mungkin dengan tulus percaya bahwa orang-orang yang ia angkat memang yang terbaik, atau setidaknya yang paling cocok dengan visi dan gaya kepemimpinannya. Namun apa yang luput dari kesadaran ini adalah bahwa kedekatan personal cenderung membutakan mata terhadap kelemahan-kelemahan objektif. Seseorang yang kita kenal baik dan kita sayangi cenderung kita nilai lebih kompeten daripada yang sebenarnya, sementara seseorang yang tidak kita kenal cenderung kita nilai kurang kompeten. Bias afeksi ini adalah bagian dari psikologi manusia yang normal, tetapi menjadi berbahaya ketika ia mempengaruhi keputusan-keputusan strategis dalam organisasi tanpa adanya mekanisme koreksi yang memadai. Apalagi ketika lingkaran dalam yang terbentuk mulai menyadari posisi istimewa mereka, mereka akan cenderung mempertahankan status quo dan menolak perubahan-perubahan yang mungkin mengancam posisi mereka. Pada titik ini, nepotisme sosial tidak lagi hanya soal pengangkatan orang dekat, tetapi telah menjadi sistem yang memproduksi dan mereproduksi dirinya sendiri (Masykuroh, 2025, hlm. 114-115).

Sejarah memberikan banyak contoh tentang bagaimana praktik nepotisme dapat menyebabkan apa yang disebut sebagai "krisis legitimasi". Krisis ini terjadi ketika ketidakadilan yang dihasilkan oleh sistem nepotisme menjadi terlalu mencolok dan tidak dapat lagi ditutupi oleh narasi-narasi legitimasi yang ada. Masyarakat atau anggota organisasi mulai mempertanyakan: mengapa orang-orang tertentu selalu mendapat perlakuan istimewa? Mengapa kritik terhadap mereka selalu dibungkam? Mengapa tidak ada transparansi dalam pengambilan

keputusan? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini mulai muncul dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka kepercayaan terhadap pemimpin dan sistem yang ada mulai terkikis. Dalam konteks organisasi keagamaan, krisis legitimasi ini menjadi sangat serius karena ia tidak hanya menyangkut aspek organisatoris, tetapi juga aspek spiritual. Ketika jemaat mulai meragukan integritas pemimpin rohani mereka, maka seluruh bangunan iman dan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap. Inilah mengapa persoalan nepotisme dalam kepemimpinan Kristen bukanlah persoalan sepele yang dapat diabaikan, melainkan persoalan serius yang menyangkut eksistensi gereja itu sendiri sebagai komunitas iman.

Kepemimpinan Kristen dan Tantangan Kontemporer

Gereja, sebagai institusi yang mengklaim diri sebagai representasi kehadiran Allah di dunia, seharusnya menjadi teladan dalam hal integritas, transparansi, dan keadilan. Namun kenyataan empiris menunjukkan bahwa gereja tidak kebal terhadap masalah-masalah yang sama yang dihadapi oleh organisasi-organisasi sekuler, termasuk masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Wibowo dan Kristanto (2017) dalam penelitian mereka tentang korupsi dalam pelayanan gereja mengungkapkan bahwa potensi penyimpangan dalam pengelolaan gereja sangatlah nyata, terutama dalam hal keuangan dan penggunaan wewenang. Studi mereka mengidentifikasi berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dalam gereja, mulai dari lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, hingga budaya paternalistik yang membuat jemaat enggan mempertanyakan keputusan-keputusan pemimpin. Yang lebih memprihatinkan, penyimpangan-penyimpangan ini seringkali dibungkus dalam bahasa rohani sehingga sulit dikritik. Seorang pendeta yang menggunakan dana gereja untuk kepentingan pribadi, misalnya, dapat membenarkannya dengan alasan bahwa ia sedang “melayani Tuhan” dan bahwa “hamba Tuhan layak mendapat penghidupannya”. Argumentasi teologis yang sebenarnya valid dalam konteks tertentu ini kemudian dipelintir untuk melegitimasi praktik-praktik yang seharusnya tidak dapat diterima (Wibowo dan Kristanto, 2017, hlm. 119–136).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Manguma, Randa, dan Palalangan (2019) tentang praktik akuntabilitas dalam organisasi Gereja Toraja Jemaat Tallunglipu menunjukkan temuan yang serupa. Studi etnografi ini mengungkapkan bahwa

meskipun secara formal gereja memiliki mekanisme akuntabilitas, dalam praktiknya mekanisme tersebut seringkali tidak berjalan efektif karena hambatan-hambatan kultural. Budaya “asing” dalam masyarakat Toraja, misalnya, menciptakan situasi di mana kritik terhadap pemimpin dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan dan tata krama. Akibatnya, jemaat cenderung diam meskipun mereka melihat adanya kejanggalan atau penyimpangan dalam pengelolaan gereja. Diamnya jemaat ini kemudian ditafsirkan oleh para pemimpin sebagai persetujuan atau setidaknya toleransi terhadap praktik-praktik yang mereka lakukan. Dalam jangka panjang, situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana penyimpangan semakin menjadi-jadi sementara mekanisme koreksi semakin melemah (Manguma, Randa dan Palalangan, 2019, hlm. 168–169).

Fenomena “celebrity pastor culture” yang belakangan ini marak diperbincangkan dalam diskursus kekristenan kontemporer menunjukkan dimensi lain dari problem kepemimpinan gereja. Fau dan Ngesthi (2025) dalam analisis mereka tentang fenomena ini mengungkapkan bahwa munculnya budaya pastor selebriti menandakan adanya pergeseran teologi kepemimpinan yang signifikan. Jika dalam tradisi klasik seorang pemimpin rohani dipandang sebagai gembala yang melayani dengan rendah hati, maka dalam budaya kontemporer ia seringkali dipandang sebagai bintang yang harus tampil memukau, yang harus memiliki karisma yang kuat, dan yang harus mampu menghibur jemaat, terutama generasi milenial yang haus akan pengalaman-pengalaman spiritual yang menarik. Pergeseran ini membawa konsekuensi serius bagi integritas kepemimpinan, karena fokus pelayanan mulai bergeser dari pembentukan spiritual jemaat menuju aktualisasi diri pemimpin. Ketika seorang pendeta lebih sibuk membangun citra publiknya daripada menggembalakan jiwa-jiwa yang terluka, ketika ia lebih peduli pada jumlah pengikut di media sosial daripada pada kualitas pertumbuhan rohani jemaatnya, maka pada saat itulah kepemimpinan Kristen sedang mengalami krisis identitas yang mendalam (Fau dan Ngesthi, 2025).

Menghadapi tantangan-tantangan kontemporer ini, literatur tentang kepemimpinan Kristen umumnya memberikan respons yang berfokus pada penguatan karakter dan integritas individual. Para penulis Kristen sering menekankan pentingnya keteladanan, kerendahan hati, kedisiplinan rohani, dan komitmen pada kebenaran sebagai fondasi kepemimpinan yang sehat (Sitiana, Sakoikoi dan Topayung, 2025). Pendekatan ini tentu sangat penting dan tidak dapat dinafikan, karena pada akhirnya integritas personal memang merupakan

prasyarat mutlak bagi kepemimpinan yang bertanggung jawab. Namun demikian, pendekatan yang terlalu berfokus pada individu memiliki kelemahan serius, yaitu kecenderungan untuk mengabaikan dimensi struktural dari persoalan kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin gagal, pendekatan individual cenderung melihatnya sebagai kegagalan moral pribadi yang dapat diatasi dengan pertobatan dan pembinaan karakter. Padahal, bisa jadi kegagalan tersebut sebenarnya adalah produk dari struktur kekuasaan yang bermasalah, dari sistem relasi yang patologis, dari budaya organisasi yang korup. Tanpa perubahan struktural, melahirkan pemimpin-pemimpin baru dengan integritas tinggi tidak akan banyak membantu, karena mereka akan tetap berada dalam sistem yang sama yang telah menghancurkan para pendahulu mereka. Di sinilah letak urgensi dari pendekatan kritis yang dapat menganalisis akar struktural dari patologi kepemimpinan, termasuk nepotisme sosial (Mozin dkk., 2025).

Kerangka Teori Kekuasaan Michel Foucault

Untuk melakukan analisis struktural yang diperlukan, artikel ini menggunakan pemikiran Michel Foucault sebagai lensa analitis utama. Foucault, seorang filsuf Prancis yang karya-karyanya telah merevolusi cara kita memahami kekuasaan, pengetahuan, dan subjektivitas, menawarkan perspektif yang sangat kaya untuk membaca fenomena kepemimpinan dalam berbagai konteks, termasuk konteks keagamaan. Pemikiran Foucault tentang kekuasaan berbeda secara radikal dari teori-teori klasik yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat represif, terpusat pada negara atau penguasa, dan dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Bagi Foucault, kekuasaan tidak dapat direduksi pada dimensi negatifnya saja, yaitu sebagai larangan atau penindasan. Kekuasaan juga bekerja secara produktif, yaitu dengan menghasilkan pengetahuan, membentuk subjek, dan menciptakan praktik-praktik sosial tertentu. Kekuasaan ada di mana-mana, bukan karena ia mencakup segalanya dalam totalitas yang homogen, tetapi karena ia muncul dari segala penjuru, dari relasi-relasi mikro yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaringan kompleks kehidupan sosial (Barasa dan Riyanto, 2023).

Dua konsep kunci dalam pemikiran Foucault yang sangat relevan untuk analisis kepemimpinan Eli adalah konsep kekuasaan sebagai relasi (*power as relation*) dan konsep kuasa pastoral (*pastoral power*). Kekuasaan sebagai relasi

menekankan bahwa kekuasaan bukanlah benda atau properti yang dapat dimiliki oleh seseorang dan kemudian digunakan sesuka hati. Sebaliknya, kekuasaan adalah sesuatu yang selalu dinegosiasikan dan dipertahankan melalui interaksi terus-menerus antara berbagai pihak. Dalam konteks kepemimpinan, ini berarti bahwa otoritas seorang pemimpin tidak pernah bersifat mutlak dan sepihak. Otoritas tersebut harus terus-menerus diperbarui melalui pengakuan dari mereka yang dipimpin, melalui praktik-praktik yang menunjukkan kompetensi dan integritas, dan melalui narasi-narasi yang melegitimasi posisi pemimpin. Jika pengakuan ini hilang, maka otoritas pemimpin akan runtuh meskipun ia secara formal masih memegang jabatan. Konsep ini membuka ruang untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan Eli sebenarnya dipertahankan atau justru dirusak oleh relasi-relasi yang ia bangun dengan berbagai pihak: dengan anak-anaknya, dengan umat Israel, dengan para imam lain, dan dengan Allah sendiri (Foucault, 1980, hlm. 98).

Konsep kedua, kuasa pastoral, dikembangkan Foucault melalui studi panjangnya tentang kekristenan awal dan tradisi pastoral dalam gereja. Foucault menemukan bahwa dalam tradisi Kristen berkembang bentuk kekuasaan yang unik, yang berbeda dari bentuk-bentuk kekuasaan politik klasik. Kuasa pastoral meminjam metafora gembala dan domba yang sangat dikenal dalam tradisi Yahudi-Kristen. Seorang gembala memiliki tanggung jawab untuk memimpin, memberi makan, merawat, dan melindungi domba-dombanya. Ia bahkan harus rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kawanannya. Dalam analogi ini, pemimpin rohani adalah gembala, sementara umat adalah domba yang harus digembalakan. Kuasa pastoral memiliki beberapa karakteristik khas: pertama, ia bersifat individual karena gembala harus mengenal setiap dombanya secara personal, memperhatikan kebutuhan masing-masing secara khusus. Kedua, ia bersifat total karena gembala mengatur seluruh aspek kehidupan domba, bukan hanya aspek-aspek tertentu yang terkait dengan fungsi formalnya. Ketiga, ia berorientasi pada keselamatan, karena tujuan akhir dari penggembalaan adalah membawa domba menuju kehidupan yang kekal (Waring dan Latif, 2018).

Namun Foucault juga memperingatkan bahwa kuasa pastoral memiliki sisi gelap yang berbahaya. Karena ia mengklaim bekerja demi kebaikan yang digembalakan, kuasa pastoral dapat menjadi sangat koersif tanpa disadari. Seorang gembala yang terlalu protektif dapat merampas otonomi domba-domba dan membuat mereka bergantung sepenuhnya padanya. Seorang gembala

yang merasa paling tahu tentang apa yang baik bagi domba-domba dapat memaksakan kehendaknya meskipun bertentangan dengan keinginan mereka. Yang lebih berbahaya lagi, ketika klaim tentang keselamatan dimasukkan ke dalam persamaan, maka resistensi terhadap gembala tidak lagi dipahami sebagai perbedaan pendapat biasa, tetapi sebagai perlawanan terhadap kehendak Allah sendiri. Dalam situasi seperti ini, kuasa pastoral yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan berubah menjadi instrumen dominasi, dan metafora gembala-domba yang indah berubah menjadi justifikasi untuk penindasan atas nama cinta dan keselamatan. Analisis Foucault tentang kuasa pastoral ini memberikan alat yang sangat tajam untuk membedah dinamika kepemimpinan Eli, di mana jabatan imam yang melekat padanya memberinya otoritas pastoral yang luar biasa besar atas umat Israel.

Kerangka Foucaultian ini akan digabungkan dalam penelitian ini dengan pemahaman tentang nepotisme sosial yang diperoleh dari literatur sosiologi organisasi Indonesia. Nepotisme sosial dipandang sebagai salah satu manifestasi dari permainan kekuasaan relasional yang dijelaskan oleh Foucault. Ketika seorang pemimpin menggunakan kedekatan personal untuk mengonsolidasi kontrol dan menetralkan oposisi, ia sedang menjalankan strategi kekuasaan tertentu yang bertujuan mempertahankan posisinya. Yang menarik, strategi ini seringkali tidak disadari sebagai praktik kekuasaan oleh para pelakunya sendiri. Seorang pemimpin yang mengangkat orang-orang dekatnya mungkin merasa bahwa ia hanya melakukan hal yang wajar, yaitu mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang ia percaya. Namun dari perspektif Foucault, tindakan ini adalah bagian dari “mikrofisika kekuasaan” yang membentuk jaringan relasi tertentu dan menutup kemungkinan-kemungkinan relasi alternatif. Sintesis antara Foucault dan literatur nepotisme sosial ini memungkinkan analisis yang tajam terhadap bagaimana struktur relasional dalam kepemimpinan Eli menciptakan kondisi bagi nepotisme dan kegagalan etis, sekaligus membuka jalan bagi refleksi kritis tentang bagaimana mencegah hal serupa terjadi dalam kepemimpinan kontemporer.

Eli sebagai Figur Kepemimpinan Relasional

Untuk memahami secara mendalam dinamika kepemimpinan Eli secara hermeneutis, kita perlu menempatkannya dalam konteks sosial-keagamaan Israel kuno pada masa transisi antara periode hakim-hakim dan periode kerajaan

(sekitar akhir abad ke-12 hingga awal abad ke-11 SM). Konteks transisi ini penting karena periode hakim-hakim ditandai oleh desentralisasi otoritas dan struktur sosial kesukuan, sementara periode kerajaan yang menyusul kemudian menghadirkan sentralisasi kekuasaan di bawah monarki—sebuah perubahan fundamental yang mempengaruhi pola kepemimpinan dan relasi kuasa di Israel kuno. Eli, yang menjabat sebagai imam sekaligus hakim atas Israel (1 Sam 4:18), berada tepat pada persimpangan antara kedua sistem ini. Norman Gottwald dalam *The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250-1050 BCE* (1979) menunjukkan bahwa periode pra-monarkis Israel dicirikan oleh sistem sosial yang relatif egaliter dengan struktur kepemimpinan berbasis sukufederasi (amfiktionik), di mana para imam dan hakim memegang otoritas moral—bukan otoritas politis-militer—sebagai penengah dan pemelihara tatanan religius. Dalam kerangka Gottwald, kepemimpinan Eli dapat dipahami sebagai bentuk otoritas transisional yang menggabungkan fungsi-fungsi keimaman (pastoral) dengan fungsi-fungsi yudisial (penegak hukum), sebuah kombinasi yang rawan terhadap penyalahgunaan wewenang ketika lingkaran dalam kekuasaan mulai memprioritaskan loyalitas personal di atas prinsip-prinsip keadilan komunal. Eli bukan sekadar imam biasa, melainkan Imam Besar yang melayani di Silo, pusat kultus yang menjadi tempat tabut perjanjian dan menjadi pusat ibadah nasional Israel sebelum pembangunan Bait Suci di Yerusalem. Posisi ini memberinya otoritas yang sangat besar, tidak hanya dalam urusan-urusan keagamaan yang bersifat ritual, tetapi juga dalam urusan-urusan sosial dan bahkan yudisial. Sebagai Imam Besar, Eli adalah penjaga tradisi suci, pengawas pelaksanaan korban, pemberi fatwa dalam perkara-perkara hukum, dan dalam banyak hal, ia adalah representasi tertinggi kehadiran Allah di tengah umat. Otoritasnya tidak datang dari kekuatan militer atau kekayaan materi, melainkan dari posisinya dalam struktur keagamaan yang diakui oleh seluruh suku Israel. Dalam bahasa Foucaultian, Eli adalah pemegang kuasa pastoral dalam skala nasional, seorang gembala agung yang bertanggung jawab atas keselamatan spiritual seluruh bangsa (Barton dan Muddiman, 2001, hlm. 201).

Dalam perspektif Foucault, otoritas sebesar ini tidak dapat dipertahankan hanya melalui jabatan formal semata. Ia harus terus-menerus direproduksi melalui jaringan relasi yang kompleks. Eli tidak memerintah dengan kekuatan militer atau sanksi fisik yang brutal. Sebaliknya, ia memerintah melalui penguasaan atas ritual-ritual suci, melalui akses eksklusifnya kepada yang ilahi, melalui pengetahuannya

tentang hukum dan tradisi, dan melalui kapasitasnya untuk mendefinisikan apa yang kudus dan apa yang najis. Relasinya dengan umat Israel adalah relasi gembala-domba dalam arti yang paling harfiah. Udat datang kepada Eli untuk mempersembahkan korban, untuk meminta petunjuk, untuk mendapatkan pengampunan, dan untuk menerima berkat. Mereka bergantung padanya untuk keselamatan spiritual mereka, dan ketergantungan ini adalah sumber utama kekuasaannya. Namun relasi yang sama juga ia bangun dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, yang juga berstatus sebagai imam dan dengan demikian menjadi perpanjangan tangan operasional dari kekuasaannya. Di sinilah letak titik kritis dalam kepemimpinan Eli. Kuasa pastoral yang seharusnya diorientasikan pada kesejahteraan seluruh kawanan mulai terfokus pada pemeliharaan lingkaran dalam keluarganya sendiri. Prioritasnya bergeser dari pelayanan kepada umat menuju perlindungan terhadap anak-anaknya, bahkan ketika anak-anaknya melakukan penyimpangan yang merugikan umat yang sama (Simatupang dan Tampake, 2025).

Yang menarik dari narasi alkitabiah adalah bahwa Eli digambarkan sebagai sosok yang tidak sepenuhnya jahat atau tidak peduli. Ketika ia mendengar tentang penyimpangan anak-anaknya, ia menegur mereka. Dalam 1 Samuel 2:23-25, Eli berkata kepada anak-anaknya: "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar yang baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat TUHAN melakukan pelanggaran! Jika seseorang berdosa terhadap seorang lain, maka Allah yang akan mengadili; tetapi jika seseorang berdosa terhadap TUHAN, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Teguran ini menunjukkan bahwa Eli menyadari adanya masalah, bahwa ia tidak buta terhadap kejahatan anak-anaknya. Namun dari perspektif analisis kekuasaan, yang menjadi persoalan bukanlah ada atau tidaknya teguran, melainkan efektivitas teguran tersebut dalam mengubah perilaku dan menghentikan penyimpangan. Teguran Eli bersifat personal dan privat, tidak diikuti dengan tindakan struktural yang tegas seperti pencopotan jabatan, pengurangan wewenang, atau sanksi publik yang akan memberi efek jera. Anak-anaknya tetap menjadi imam, tetap memiliki akses yang sama kepada sumber daya kultus, tetap berinteraksi dengan umat yang datang mempersembahkan korban. Dengan kata lain, struktur kekuasaan yang memungkinkan penyimpangan terjadi tetap utuh dan tidak tersentuh oleh teguran Eli.

Kegagalan Eli untuk mengambil tindakan struktural ini dapat dibaca sebagai manifestasi dari apa yang dalam teori organisasi disebut sebagai “konflik kepentingan”. Sebagai ayah, Eli mencintai anak-anaknya dan mungkin berharap bahwa mereka akan berubah dengan sendirinya. Sebagai Imam Besar, ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan ibadah dan melindungi umat dari penyalahgunaan wewenang. Kedua peran ini berada dalam ketegangan yang sulit didamaikan, dan dalam kasus Eli, peran sebagai ayah tampaknya mengalahkan peran sebagai Imam Besar. Namun dari perspektif Foucault, penjelasan ini masih terlalu berfokus pada psikologi individu. Yang lebih penting untuk dianalisis adalah bagaimana struktur relasi kuasa itu sendiri menciptakan kondisi di mana konflik kepentingan tersebut dapat muncul dan bertahan. Dalam sistem keimaman Israel kuno, jabatan imam memang bersifat turun-temurun. Keturunan Harun, termasuk Eli dan anak-anaknya, memiliki hak eksklusif untuk menjadi imam. Sistem ini pada dasarnya sudah mengandung potensi nepotisme struktural, karena ia menjamin bahwa posisi-posisi kunci akan selalu diisi oleh orang-orang dari keluarga yang sama. Ketika sistem seperti ini digabungkan dengan kelemahan personal seorang pemimpin, maka ledakan penyimpangan tinggal menunggu waktu.

Struktur Nepotisme Sosial: Anak-anak Eli dalam Jaringan Kekuasaan

Hofni dan Pinehas, kedua anak Eli, menduduki posisi sebagai imam bukan semata-mata karena kelayakan spiritual atau kapasitas moral mereka, tetapi terutama karena mereka adalah keturunan Eli dan dengan demikian termasuk dalam garis keimaman yang sah. Dalam struktur kuasa keimaman Israel kuno, hanya keturunan suku Lewi, khususnya keturunan Harun, yang dapat menjadi imam (Bilangan 3:5-10). Sistem keimaman yang berbasis keturunan (*hereditary priesthood*) ini pada awalnya dirancang untuk menjaga kemurnian ibadah dan kesinambungan tradisi, namun dalam praktiknya ia menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Menurut Roland de Vaux dalam karyanya yang menjadi rujukan klasik *Ancient Israel: Its Life and Institutions* (1997), sistem keimaman turun-temurun di Israel kuno memang memberikan stabilitas dan keberlanjutan ibadah, tetapi sekaligus mengandung risiko inheren berupa masuknya individu-individu yang tidak memiliki kesungguhan spiritual ke dalam jabatan suci. Risiko ini diperparah oleh kenyataan bahwa dalam struktur sosial Israel pra-monarkis—sebagaimana dijelaskan oleh Norman Gottwald dalam *The Tribes of Yahweh* (1979)—tidak terdapat mekanisme institusional yang efektif

untuk mengevaluasi kelayakan spiritual para imam selain dari garis keturunan mereka. Sementara itu, studi Matthew R. Rasure dalam *Holy Brothers: Geography, Kinship, and Priesthood in Ancient Israel* (2024) menunjukkan bahwa persaingan internal antara kelompok imam Mushite (pengikut Musa) dan kelompok imam Aaronite (keturunan Harun) seringkali menciptakan celah bagi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, terutama ketika seorang pemimpin imam gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerabatnya sendiri. Dengan demikian, secara metodologis, analisis terhadap kepemimpinan Eli tidak dapat berhenti pada evaluasi moral individual, melainkan harus menelusuri struktur kelembagaan yang memungkinkan praktik nepotisme sosial tumbuh subur dalam sistem keimaman yang berbasis keturunan. Ketika seseorang menjadi imam bukan karena panggilan dan kapasitas, tetapi karena kelahiran, maka risiko bahwa ia tidak memiliki komitmen spiritual yang memadai menjadi sangat besar. Inilah yang terjadi pada Hofni dan Pinehas. Narasi alkitabiah dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah “orang-orang dursila” yang “tidak mengenal TUHAN” (1 Sam 2:12). Mereka mewarisi jabatan tanpa mewarisi iman, mereka mendapatkan otoritas tanpa memiliki integritas. Namun yang lebih penting dari perspektif analisis kekuasaan adalah bahwa posisi mereka sebagai anak Eli memberikan mereka perlindungan yang luar biasa. Sebagai bagian dari inner circle kekuasaan keimaman, mereka dapat berbuat hampir sesuka hati tanpa takut akan sanksi.

Penyimpangan yang dilakukan Hofni dan Pinehas sangatlah serius. Pertama, mereka menyalahgunakan korban persembahan umat. Dalam praktik ibadah Israel kuno, sebagian dari daging korban menjadi bagian para imam sebagai tunjangan hidup mereka. Namun Hofni dan Pinehas tidak puas dengan bagian yang sah. Mereka mengirim pelayan mereka untuk mengambil daging korban sebelum lemaknya dibakar di atas mezbah, bahkan dengan kekerasan jika perlu (1 Sam 2:13-17). Praktik ini tidak hanya melanggar aturan ritual, tetapi juga merampas hak umat untuk mempersembahkan korban dengan layak. Yang lebih parah, tindakan ini menyebabkan umat “engggan mempersembahkan korban kepada TUHAN” (1 Sam 2:17). Dengan kata lain, penyimpangan Hofni dan Pinehas tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga merusak hubungan spiritual antara umat dan Allah. Kedua, mereka melakukan percabulan dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu Kemah Pertemuan (1 Sam 2:22). Tindakan ini menodai kekudusan tempat ibadah dan menambah daftar panjang dosa-dosa mereka. Dalam konteks budaya Timur Dekat kuno, di mana kemurnian seksual

sangat dijunjung tinggi, terutama dalam konteks kultus, tindakan ini merupakan skandal yang luar biasa besarnya.

Yang menjadi pertanyaan kritis adalah: bagaimana mungkin dua orang imam yang melakukan penyimpangan seberat ini dapat bertahan dalam jabatan mereka? Jawabannya terletak pada jaringan kekuasaan yang melindungi mereka. Sebagai anak Eli, mereka memiliki akses istimewa kepada pusat kekuasaan. Eli adalah satu-satunya otoritas yang secara struktural dapat menjatuhkan sanksi kepada mereka, namun Eli tidak melakukannya. Umat yang menjadi korban penyimpangan mereka tidak memiliki saluran untuk menuntut akuntabilitas. Dalam struktur sosial Israel kuno, tidak ada mekanisme formal bagi umat awam untuk mengadukan atau menggugat para imam. Para imam adalah otoritas tertinggi dalam urusan keagamaan, dan tidak ada lembaga di atas mereka yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Situasi ini menciptakan apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai "zona impunitas", di mana para pelaku kejahatan dapat berbuat semaunya karena tidak ada mekanisme efektif untuk menghukum mereka. Umat hanya bisa diam dan menderita dalam diam, atau paling banter menyebarkan kabar tentang kejahatan para imam dari mulut ke mulut, seperti yang tersirat dalam teguran Eli bahwa ia mendengar "dari segenap bangsa ini" tentang perbuatan jahat anak-anaknya (1 Sam 2:23-24).

Dari perspektif Foucault, situasi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan dan hukuman, tetapi juga melalui pembiaran dan normalisasi. Eli membiarkan penyimpangan anak-anaknya terus berlangsung. pembiaran ini, meskipun mungkin dimotivasi oleh cinta ayah yang salah arah, pada praktiknya berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang mempertahankan status quo. Dengan tidak mengambil tindakan, Eli secara implisit membenarkan apa yang dilakukan anak-anaknya. Ia mengirim sinyal kepada mereka bahwa apa pun yang mereka lakukan, tidak akan ada konsekuensi serius. Ia juga mengirim sinyal kepada umat bahwa protes dan keluhan mereka tidak akan didengar. Dalam jangka panjang, pembiaran ini menciptakan "normalitas baru" di mana penyimpangan menjadi hal yang biasa dan diterima. Hofni dan Pinehas terus melakukan kejahatan mereka karena mereka tahu tidak akan dihukum. Umat mulai menerima perlakuan buruk sebagai takdir yang tidak bisa dihindari. Sementara Eli terus menjalankan ritual-ritual keagamaan seolah-olah tidak ada yang salah. Inilah yang Foucault sebut sebagai "mikrofisika kekuasaan", yaitu cara-cara halus di mana kekuasaan meresap ke dalam relasi-relasi sosial yang paling kecil dan

membentuk perilaku serta harapan orang-orang tanpa perlu menggunakan kekerasan terbuka.

Patologi Otoritas Relasional dari Perspektif Foucault

Salah satu kontribusi paling signifikan dari pemikiran Foucault untuk analisis sosial adalah konsepnya tentang normalisasi. Berbeda dengan kekuasaan tradisional yang bekerja melalui larangan dan hukuman yang spektakuler, kekuasaan modern bekerja melalui penetapan norma-norma dan kemudian mendisiplinkan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma tersebut. Proses normalisasi ini tidak memerlukan kekerasan fisik, karena ia bekerja melalui pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi yang terus-menerus. Individu-individu belajar untuk mengawasi diri mereka sendiri, untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan apa yang dianggap normal. Dalam kasus Eli, kita melihat proses normalisasi yang bekerja dalam arah yang berlawanan. Alih-alih menegakkan norma-norma kekudusan dan integritas, sistem kekuasaan yang ada justru menormalisasi penyimpangan. Ketika Hofni dan Pinehas melakukan kejahatan mereka tanpa mendapat hukuman, ketika Eli hanya menegur dengan lembut tanpa tindakan tegas, ketika umat terus datang ke Silo meskipun dilayani oleh imam-imam yang korup, maka pada saat itulah penyimpangan mulai menjadi normal. Orang-orang mulai berpikir bahwa begitulah seharusnya dunia berjalan, bahwa imam-imam memang berhak atas apa pun yang mereka inginkan, bahwa tidak ada gunanya melawan. Normalisasi penyimpangan ini adalah bentuk kekuasaan yang paling efektif, karena ia membuat orang menerima ketidakadilan sebagai takdir.

Dalam konteks ini, teguran Eli kepada anak-anaknya dapat dibaca sebagai ritual yang justru memperkuat normalisasi, bukan menghentikannya. Teguran itu memberi kesan bahwa Eli telah melakukan sesuatu, bahwa ia tidak diam saja. Namun karena tidak diikuti tindakan nyata, teguran itu menjadi semacam “catatan kaki” yang tidak mengubah apa pun. Eli dapat merasa bahwa ia telah menjalankan tanggung jawabnya dengan menegur, sementara anak-anaknya tahu bahwa teguran itu tidak berarti apa-apa. Ritual teguran ini, dalam analisis Foucault, adalah bagian dari teknologi kekuasaan yang memungkinkan sistem untuk bertahan. Ia menciptakan ilusi bahwa ada mekanisme kontrol, padahal kontrol itu sendiri telah dinetralisir oleh jaringan relasi yang ada. Inilah yang disebut Foucault sebagai

“strategi tanpa strategi”, yaitu cara-cara di mana kekuasaan bekerja tanpa perlu ada subjek yang secara sadar merencanakannya. Eli mungkin tidak secara sadar berniat melindungi anak-anaknya dari hukuman, namun struktur relasi di mana ia berada membuat tindakan tegas menjadi hampir mustahil secara psikologis dan sosial.

Yang lebih menarik untuk dianalisis adalah bagaimana kuasa pastoral yang melekat pada jabatan Eli justru menjadi alat yang paling efektif untuk mempertahankan status quo yang korup. Kuasa pastoral, seperti dijelaskan sebelumnya, adalah kekuasaan yang mengklaim bekerja demi kebaikan yang dikuasai. Seorang gembala sejati, dalam metafora pastoral, tidak pernah bertindak untuk kepentingannya sendiri, tetapi selalu untuk keselamatan domba-dombanya. Klaim ini memberikan legitimasi moral yang sangat kuat kepada pemegang kuasa pastoral. Ketika Eli berbicara, ia berbicara bukan sebagai Eli pribadi, tetapi sebagai Imam Besar, sebagai wakil Allah. Ketika ia membiarkan penyimpangan anak-anaknya, ia dapat membenarkannya dengan alasan bahwa ia ingin menjaga keharmonisan keluarga, atau bahwa ia tidak ingin mempermalukan anak-anaknya di depan umum, atau bahwa ia masih berharap mereka bertobat dengan sendirinya. Semua alasan ini terdengar masuk akal, bahkan mulia, dalam kerangka kuasa pastoral. Namun pada praktiknya, pembiaran ini justru menghancurkan domba-domba yang seharusnya ia lindungi. Umat terus menderita, kekudusan tempat ibadah terus dinodai, dan nama Allah terus dihujat karena ulah para imam. Kuasa pastoral yang seharusnya menjadi kekuatan pembebas dan korektif telah berubah menjadi alat yang membiarkan patologi berkembang. Inilah yang Foucault sebut sebagai “paradoks pastoral”: kekuasaan yang mengklaim bekerja demi kebaikan orang lain dapat menjadi paling berbahaya justru karena klaim itu sendiri membuat orang sulit mengkritiknya.

Patologi otoritas relasional dalam kepemimpinan Eli mencapai puncaknya ketika Allah sendiri turun tangan melalui penglihatan-penglihatan dan nubuat-nubuat. Dalam 1 Samuel 2:27-36, seorang “abdi Allah” datang kepada Eli dan menyampaikan firman penghukuman yang keras. Allah mengingatkan Eli bahwa ia telah dipilih secara istimewa dari semua suku Israel untuk menjadi imam, namun ia justru “menghormati anak-anakmu lebih dari pada-Ku” (1 Sam 2:29). Kalimat ini sangat penting dari perspektif analisis kekuasaan. Eli dituduh telah salah dalam menentukan prioritas loyalitasnya. Ia lebih menghormati anak-anaknya, lebih melindungi mereka, daripada menghormati Allah yang telah memanggilnya.

Dalam bahasa Foucaultian, Eli telah membiarkan jaringan relasi kekeluargaan mengalahkan relasi pastoral yang seharusnya menjadi dasar kepemimpinannya. Ia menggunakan kuasa pastoral yang diberikan Allah bukan untuk melayani umat, tetapi untuk melindungi keluarganya. Akibatnya, Allah menarik mandat pastoral itu darinya. Nubuat itu menyatakan bahwa keturunannya akan mati di usia muda, bahwa tanda kehancuran keluarganya adalah kematian kedua anaknya pada hari yang sama, dan bahwa Allah akan membangkitkan seorang imam yang setia yang akan melakukan apa yang ada dalam hati dan pikiran Allah. Penghukuman ini menunjukkan bahwa meskipun manusia dapat menormalisasi penyimpangan dan menutup mata terhadap ketidakadilan, Allah sebagai sumber otoritas tertinggi pada akhirnya akan bertindak untuk memulihkan keadilan.

Implikasi bagi Kepemimpinan Kristen Kontemporer

Analisis Foucaultian terhadap kepemimpinan Eli bukan sekadar latihan akademis untuk memahami teks kuno, tetapi memiliki relevansi yang sangat praktis untuk kepemimpinan Kristen kontemporer. Fenomena favoritisme dan pembentukan inner circle yang eksklusif masih sering ditemui dalam gereja-gereja masa kini, meskipun dalam bentuk yang berbeda dan dengan pembenaran yang lebih canggih. Salah satu manifestasi kontemporer yang paling mencolok adalah fenomena “celebrity pastor culture” yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam budaya ini, seorang pendeta tidak lagi dipandang sebagai gembala yang melayani dengan rendah hati, tetapi sebagai bintang yang harus dikelilingi oleh pengawal, asisten pribadi, dan tim khusus yang mengurus citra publiknya. Orang-orang yang menjadi bagian dari lingkaran dalam ini seringkali dipilih bukan berdasarkan kompetensi atau kualitas spiritual mereka, tetapi berdasarkan loyalitas dan kesediaan untuk mendukung narasi tentang kehebatan sang pendeta. Mereka menjadi semacam “Hofni dan Pinehas modern” yang menikmati akses istimewa kepada sumber daya gereja dan kekuasaan pastoral, sementara jemaat biasa tetap berada di luar pagar (Fau dan Ngesthi, 2025).

Yang lebih berbahaya lagi, praktik-praktik semacam ini seringkali dibungkus dalam bahasa teologis yang sulit dikritik. Seorang pendeta yang mengangkat anaknya sebagai penggantinya, misalnya, dapat membenarkannya dengan alasan “panggilan Tuhan” atau “urapan yang diturunkan”. Seorang pendeta yang selalu membawa serta teman dekatnya dalam setiap perjalanan dinas

dapat membenarkannya dengan alasan “kebutuhan untuk memiliki orang yang dipercaya”. Seorang pendeta yang hanya mendengarkan masukan dari segelintir orang dekat dapat membenarkannya dengan alasan “menjaga kesatuan visi”. Semua pembenaran ini terdengar sangat rohani, namun pada praktiknya mereka menutup ruang bagi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang lebih luas dari jemaat. Inilah yang Foucault sebut sebagai “strategi kekuasaan” yang paling efektif: membuat praktik dominasi tampak sebagai pelayanan, membuat penutupan ruang partisipasi tampak sebagai penjagaan kesatuan, membuat pengabaian terhadap kritik tampak sebagai fokus pada visi.

Analisis Foucaultian atas kepemimpinan Eli memberikan peringatan yang sangat serius tentang bahaya menyamakan kedekatan relasional dengan legitimasi, dan kepercayaan pribadi dengan kebebasan dari akuntabilitas. Eli percaya bahwa anak-anaknya dapat dipercaya karena mereka adalah anak-anaknya. Ia tidak merasa perlu untuk mengawasi mereka secara ketat, untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka, atau untuk membuka ruang bagi evaluasi eksternal. Kepercayaan personal menggantikan akuntabilitas struktural, dan hasilnya adalah bencana. Dalam gereja-gereja kontemporer, pola pikir yang sama masih sering ditemui. Seorang pendeta senior mungkin percaya bahwa asisten pribadinya yang telah lama melayaninya tidak mungkin melakukan korupsi. Sebuah tim inti pelayanan mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu melaporkan penggunaan dana secara transparan karena semua orang sudah saling percaya. Sebuah yayasan gereja mungkin mengangkat anggota keluarganya ke posisi-posisi strategis tanpa proses seleksi yang ketat karena “keluarga adalah yang paling bisa diandalkan”. Pola pikir ini, meskipun tampak wajar, adalah benih-benih nepotisme sosial yang dapat tumbuh menjadi pohon yang merusak seluruh organisasi.

Gereja-gereja yang dipimpin secara karismatik atau dengan model kepemimpinan tunggal (senior pastor) sangat rentan terhadap distorsi semacam ini. Dalam model kepemimpinan tunggal, seorang pendeta memiliki otoritas yang sangat besar dan seringkali tidak ada mekanisme checks and balances yang efektif. Majelis gereja atau badan pengurus mungkin ada secara formal, tetapi dalam praktiknya mereka hanya menjadi stempel untuk keputusan-keputusan yang telah diambil oleh sang pendeta. Dalam situasi seperti ini, godaan untuk membentuk inner circle yang loyal menjadi sangat besar. Pendeta akan cenderung mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang setuju dengannya, yang mendukungnya

tanpa kritik, yang akan membelanya dalam situasi apa pun. Orang-orang ini kemudian akan mendapatkan akses istimewa kepada sumber daya, informasi, dan kekuasaan. Mereka akan menjadi penjaga gerbang yang menentukan siapa yang dapat bertemu dengan pendeta, informasi apa yang sampai kepadanya, dan keputusan apa yang diambil. Dalam jangka panjang, struktur ini akan menciptakan gelembung yang mengisolasi pendeta dari realitas jemaat. Ia hanya mendengar apa yang ingin ia dengar, hanya melihat apa yang ingin ia lihat, dan hanya mengetahui apa yang ingin ia ketahui. Ketika pada akhirnya skandal atau kegagalan terjadi, ia akan terkejut karena tidak ada yang memberitahunya bahwa ada masalah (Yonatan Alex Arifianto, Mulyono dan Nainggolan, 2024, hlm. 8).

Nepotisme sosial dalam konteks gereja dapat terwujud dalam berbagai bentuk yang halus. Bentuk pertama adalah pengangkatan orang-orang dekat ke posisi-posisi strategis tanpa proses seleksi yang transparan. Ini bisa berupa pengangkatan anak pendeta sebagai penggantinya, pengangkatan sahabat karib sebagai ketua yayasan, atau pengangkatan mantan mahasiswa bimbingan sebagai gembala sidang. Bentuk kedua adalah pembentukan tim-tim khusus yang hanya berisi orang-orang tertentu dan tertutup bagi partisipasi yang lebih luas. Tim ini mungkin bertugas merumuskan visi gereja, mengelola dana khusus, atau mengambil keputusan-keputusan penting, namun keanggotaannya tidak pernah diumumkan atau dipertanggungjawabkan. Bentuk ketiga adalah budaya "sungkan" yang membuat jemaat enggan mengkritik atau mempertanyakan keputusan-keputusan pemimpin. Budaya ini seringkali dibungkus dalam bahasa rohani seperti "jangan berkata-kata melawan orang yang diurapi Tuhan" atau "kami percaya penuh kepada hamba Tuhan". Akibatnya, tidak ada ruang yang aman untuk menyuarakan kritik, dan masalah-masalah kecil dibiarkan membesar hingga menjadi krisis (Mozin dkk., 2025).

Dialog antara analisis Foucaultian dan literatur Indonesia tentang nepotisme sosial memperkuat argumen bahwa persoalan ini tidak bisa direduksi pada moralitas individual semata. Penelitian Puansah (2025) tentang nepotisme di pemerintahan desa menunjukkan bagaimana relasi kekerabatan dan pertemanan menjadi infrastruktur untuk memperkaya diri dan menguasai sumber daya publik. Struktur sosial yang ada, seperti ikatan keluarga, pertemanan, atau kesamaan afiliasi, menjadi jalan masuk bagi praktik-praktik koruptif. Hal yang sama dapat terjadi dalam konteks gereja, dengan perbedaan bahwa gereja memiliki lapisan legitimasi moral tambahan yang berasal dari klaim tentang panggilan ilahi dan

otoritas spiritual. Legitimasi ini justru dapat menjadi alat yang paling efektif untuk membungkus praktik nepotisme dalam narasi pelayanan dan kepercayaan. Ketika seorang pendeta berkata "Tuhan yang menempatkan dia di sini", sulit bagi jemaat untuk mempertanyakan apakah proses seleksinya transparan atau tidak. Ketika seorang ketua majelis berkata "kami sudah berdoa dan mendapat keyakinan", sulit bagi jemaat untuk menanyakan apakah ada pertimbangan objektif di balik keputusan tersebut. Bahasa rohani dapat menjadi tameng yang melindungi praktik-praktik duniawi dari kritik.

Namun demikian, penting untuk diakui bahwa pendekatan Foucault juga memiliki keterbatasan yang perlu disadari. Fokus Foucault yang kuat pada kekuasaan sebagai jaringan relasional yang tersebar dapat mengaburkan tanggung jawab agen individu. Dalam analisis Foucaultian, kekuasaan tidak dimiliki oleh siapa pun, ia hanya beredar dalam relasi-relasi. Konsekuensinya, sulit untuk menunjuk siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan, karena semua orang hanyalah titik dalam jaringan. Pendekatan ini, jika diterapkan secara kaku, dapat berujung pada semacam "determinisme struktural" di mana individu tidak lebih dari sekadar produk dari struktur yang melingkupinya. Eli, dalam perspektif ini, hanyalah korban dari sistem keimaman turun-temurun yang memaksanya untuk menerima anak-anaknya sebagai imam meskipun mereka tidak layak. Namun artikel ini berargumen bahwa meskipun kekuasaan tersebar dan struktur berpengaruh, posisi khusus seorang pemimpin dalam struktur pastoral power menempatkannya pada titik tanggung jawab yang unik. Eli memang tidak bisa mengubah sistem keimaman secara sepihak, tetapi ia bisa menggunakan otoritasnya untuk mengambil tindakan disipliner terhadap anak-anaknya. Ia bisa mencopot mereka dari jabatan, membatasi wewenang mereka, atau setidaknya mengawasi mereka secara ketat. Ia tidak melakukan semua itu. Dalam hal ini, ia tetap bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya, meskipun pilihan-pilihan itu dibuat dalam konteks struktur yang membatasinya.

Keterbatasan lain dari pendekatan Foucault adalah kecenderungannya untuk melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang netral secara moral. Bagi Foucault, kekuasaan bukanlah hal yang baik atau buruk; ia adalah fakta sosial yang ada di mana-mana. Analisisnya lebih berfokus pada bagaimana kekuasaan bekerja daripada pada apakah kekuasaan itu adil atau tidak. Pendekatan ini, jika diterapkan secara eksklusif, dapat mengabaikan dimensi etis dan normatif yang sangat penting dalam diskursus teologis. Artikel ini mencoba mengatasi keterbatasan ini dengan

tetap mempertahankan sensitivitas etis yang berasal dari tradisi teologis. Analisis Foucaultian digunakan untuk membongkar mekanisme kekuasaan, sementara evaluasi etis tetap dilakukan berdasarkan standar-standar keadilan dan integritas yang berasal dari iman Kristen. Dengan kata lain, Foucault membantu kita melihat bagaimana kekuasaan bekerja, sementara teologi membantu kita menilai apakah cara kerja itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Sintesis ini memungkinkan analisis yang tajam tanpa kehilangan orientasi normatif yang menjadi ciri khas pemikiran Kristen.

Pembacaan Foucaultian terhadap kepemimpinan Eli menantang interpretasi tradisional yang hanya menyoroti aspek moral individual. Analisis ini menunjukkan bahwa kegagalan Eli adalah kegagalan sistemik yang dihasilkan oleh struktur kekuasaan relasional yang patologis. Sementara teologi sering menekankan pertanggungjawaban personal di hadapan Tuhan—seperti nubuat penghukuman dalam 1 Samuel 2:27-36 dan 3:11-18—Foucault mengingatkan kita untuk memeriksa arsitektur relasi kuasa yang membuat pertanggungjawaban itu hampir mustahil terjadi dalam ruang manusiawi. Eli bertanggung jawab di hadapan Allah, dan nubuat penghukuman menegaskan hal itu. Namun pertanyaannya adalah: bagaimana pertanggungjawaban itu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana mekanisme akuntabilitas dapat dibangun sehingga penyimpangan dapat dicegah sebelum Allah harus turun tangan dengan hukuman yang spektakuler? Inilah pertanyaan yang relevan bagi gereja kontemporer, dan analisis Foucaultian membantu kita menjawabnya dengan menunjukkan pentingnya mendesain struktur relasi kuasa yang sehat.

Implikasi praktis dari analisis ini bagi kepemimpinan Kristen kontemporer sangatlah jelas. Pertama, gereja perlu membangun sistem checks and balances yang kuat. Tidak boleh ada satu orang pun, betapapun karismanya, yang memiliki kekuasaan absolut tanpa pengawasan. Kedua, gereja perlu memastikan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut pengangkatan pejabat dan penggunaan sumber daya. Ketiga, gereja perlu menciptakan mekanisme akuntabilitas yang melindungi pemberi kritik. Jemaat harus merasa aman untuk menyuarakan keberatan atau pertanyaan tanpa takut akan pembalasan. Keempat, gereja perlu melakukan evaluasi berkala terhadap struktur kepemimpinannya, mengidentifikasi potensi-potensi nepotisme sosial, dan mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Kelima, gereja perlu mendidik jemaat dan pemimpinnya tentang bahaya nepotisme sosial dan

pentingnya membangun budaya organisasi yang sehat. Kepemimpinan yang sehat tidak hanya membutuhkan integritas personal, tetapi juga desain struktur relasi kuasa yang mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan wewenang. Hanya dengan cara ini gereja dapat menjadi komunitas yang benar-benar mencerminkan keadilan dan kasih Allah di tengah dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kepemimpinan Imam Eli dalam 1 Samuel 2:12-4:22 menggunakan perspektif teori kekuasaan relasional Michel Foucault, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting.

Pertama, kegagalan Eli dalam mengatasi penyimpangan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan moral individual. Di balik kegagalan personal tersebut terdapat struktur nepotisme sosial yang terbangun dalam jaringan kekuasaannya. Sistem keimanan turun-temurun, posisi Eli sebagai Imam Besar dengan otoritas pastoral yang luar biasa, serta relasi ayah-anak telah menciptakan kondisi di mana penyimpangan dapat terjadi dan berlangsung lama tanpa mekanisme koreksi yang efektif. Kedua, inner circle yang dibentuk oleh anak-anak Eli berfungsi sebagai perpanjangan otoritas yang sekaligus menormalisasi penyimpangan dan menutup saluran akuntabilitas. Teguran lisan Eli tanpa tindakan struktural yang tegas menciptakan “zona impunitas” di mana Hofni dan Pinehas merasa aman dari konsekuensi. Proses normalisasi ini membuat praktik-praktik yang seharusnya menyimpang mulai diterima sebagai sesuatu yang biasa dalam jangka panjang.

Ketiga, kuasa pastoral yang melekat pada jabatan Eli terdistorsi menjadi alat untuk mempertahankan status quo yang korup. Alih-alih digunakan untuk melindungi umat dan membersihkan Bait Suci dari penyalahgunaan, otoritas pastoral Eli justru melindungi anak-anaknya dan membiarkan sistem yang rusak terus berjalan. Paradoks pastoral ini menunjukkan bahwa klaim pelayanan dan pengembalaan tidak otomatis menjamin kekuasaan dijalankan dengan benar. Keempat, penelitian ini menghasilkan konsep “nepotisme relasional” sebagai sintesis antara analisis Foucaultian dan literatur nepotisme sosial Indonesia. Konsep ini merujuk pada praktik memberi keuntungan berdasarkan kedekatan relasional yang membentuk jaringan kekuasaan tertutup, resisten terhadap kritik,

dan sering dibungkus dalam narasi positif seperti loyalitas atau kesatuan visi.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah sintesis antara analisis tekstual biblika dengan teori sosial-kritis Foucault yang membuka jalan bagi pembacaan Alkitab yang lebih kaya dan relevan dengan kompleksitas kontemporer. Kontribusi praktisnya adalah peringatan bagi gereja untuk membangun sistem checks and balances yang kuat, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme akuntabilitas yang melindungi pemberi kritik. Penelitian lanjutan diperlukan melalui studi empiris di gereja kontemporer, analisis komparatif dengan figur kepemimpinan lain, serta penelitian interdisipliner untuk mengembangkan model kepemimpinan yang tahan terhadap distorsi kekuasaan. Pada akhirnya, kepemimpinan yang sehat membutuhkan integritas personal sekaligus desain struktur relasi kuasa yang mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Barasa, M. dan Riyanto, F.X.A. (2023). "Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), hlm. 188–195. Tersedia pada: <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1785>.
- Barton, J. dan Muddiman, J. (2001). *The Oxford Bible commentary*. Oxford: Oxford University Press (Oxford reference).
- Fau, A.G. dan Ngesthi, Y.S.E. (2025). "Fallen Leaders dan Mereduksi Celebrity Pastor Culture dalam Perspektif Etis Teologi," *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)*, 7(2), hlm. 316–325. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59177/veritas.v7i2.403>.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Pantheon Books.
- Manguma, V., Randa, F. dan Palalangan, C.A. (2019). "Mengungkap Praktik Akuntabilitas Dalam Organisasi Gereja Toraja Jemaat Tallunglipu," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), hlm. 165–173. Tersedia pada: <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2328>.
- Masykuroh, S. (2025). "Analisis Jejaring Sosial: Nepotisme dan Krisis Legitimasi pada Masa Khalifah Utsman bin Affan (644-656M)," *El Tarikh: Journal of History*,

- Culture and Islamic Civilization*, 6(2), hlm. 113–127. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24042/00202562815700>.
- Mozin, S.Y. dkk. (2025). "Korupsi Nepotisme dan Inefisiensi: Potret Patologi Birokrasi dalam Perspektif Studi Kasus," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), hlm. 52–59. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.955>.
- Palmer, R.E. (1969). *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Northwestern University Press.
- Puansah, I. (2025). "Praktik Nepotisme pada Pemerintahan Desa," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), hlm. 568–581. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4559>.
- Saebani, B.A. dan Mubarak, A.F. (2024). "Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya," *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics*, 1(1), hlm. 10–18. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59066/jlsdp.v1i1.851>.
- ŞEKER, C., KARADAYI, D. dan KAYA, A. (2024). "The Relationship Between Nepotism Leadership and Organizational Learning in Organizations: Kurumlarda Nepotizm Liderliği Ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişki," *Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches*, 10(46), hlm. 205–215. Tersedia pada: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14024884>.
- Sekretariat Jmbk (2023). "Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 7 No. 1," *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 7(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.24912/jmbk.v7i1.22589>.
- Simatupang, A.F. dan Tampake, T. (2025). "Pendeta, Kekuasaan, dan Hukum Siasat Gereja: Pendekatan Foucaultian terhadap Analisis Kekuasaan dalam Konteks Keagamaan," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, 8(1), hlm. 01–17. Tersedia pada: <https://doi.org/10.34081/fidei.v8i1.572>.
- Sitiana, S., Sakoikoi, R. dan Topayung, S.L. (2025). "Membangun Kepemimpinan Kristen yang Efektif dalam Gereja," *Damai : Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Filsafat*, 2(2), hlm. 81–94. Tersedia pada: <https://doi.org/10.61132/damai.v2i2.1077>.
- Waring, J. dan Latif, A. (2018). "Of Shepherds, Sheep and Sheepdogs? Governing the Adherent Self through Complementary and Competing

'Pastorates',," *Sociology*, 52(5), hlm. 1069–1086. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1177/0038038517690680>.

Wibowo, E.A. dan Kristanto, H. (2017). "Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), hlm. 105–136. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.104>.

Yonatan Alex Arifianto, Mulyono, H. dan Nainggolan, R. (2024). "Etika Kepemimpinan Kristen dalam Tantangan Kontemporer: Upaya Membangun Dedikasi dan Integritas Kepemimpinan Gereja," *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)*, 6(2), hlm. 238–248. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59177/veritas.v6i2.283>.